



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PENGADILAN NEGERI RAHA**

Jl. M. H. Thamrin No.33, Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
Provinsi Sulawesi Tenggara 93611, www.pn-raha.go.id, pnraha@yahoo.com

Raha, 10 Januari 2024

Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Di –
Kendari

SURAT PENGANTAR
Nomor : 156 /KPN.W23.U3/OT1.6/I/2024

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Raha	1 (satu) Rangkap	Dikirim dengan hormat untuk diketahui

Diterima tanggal

Penerima

Pengirim



Nomor Telepon :

Pos-el :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI RAHA



Jl. M.H. Thamrin No. 33 Raha



0403-2521045



pnraha@yahoo.com



www.pn-raha.go.id



Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatNYA kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengembangkan tugas untuk mewujudkan cita - cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Raha tahun 2023 ini merupakan penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun anggaran pada tahun 2023 yang penyusunannya disesuaikan dengan outline Laporan Tahunan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT 01.1/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini akan menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Raha dan segala kendala serta harapan, mendapat perhatian yang selanjutnya dapat ditindak lanjuti.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2023 ini.

Raha, 10 Januari 2024



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI RAHA	4
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	4
- Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	5
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	6
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	6
B. Penyelesaian Perkara	7
- Jumlah sisa perkara yang diputus	7
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	8
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.....	8
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	9
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	9
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	9
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	10
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	12
- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	12
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	13
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN / PENDIDIKAN	13
A.Mutasi	13
B.Promosi	14
C.Pensiun.....	14
D. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	14
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	16
A. Pengelolaan Keuangan	16
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	17
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	22
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	25
A. Akreditasi Penjamin Mutu	25
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	25
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	27
BAB VI PENGAWASAN	31
A. Internal.....	31
B. Evaluasi.....	32

BAB VII PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Pengadilan

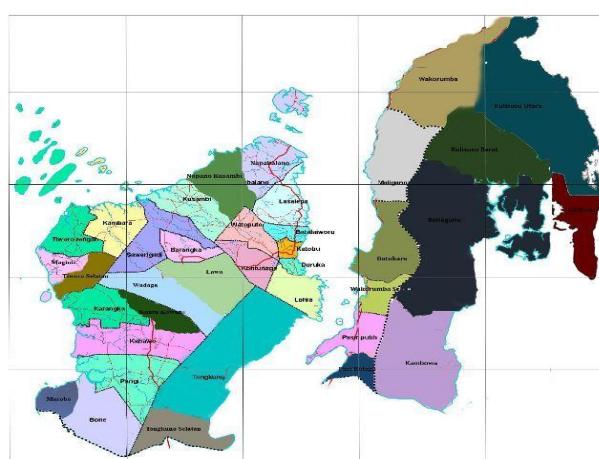
Pengadilan Negeri Raha merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Raha termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan daerah hukumnya meliputi 3 Kabupaten, menjadi :

1. Kabupaten Muna
2. Kabupaten Muna Barat
3. Kabupaten Buton Utara

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RAHA



B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Raha :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Raha :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Raha;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. **Kemandirian Kekuasaan Kehakiman** (*Pasal 24 ayat (1) UUD 1945*)
 - a. Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (*Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*).
 - b. Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. **Integritas dan Kejujuran** (*Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.
3. **Akuntabilitas** (*Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. **Responsibilitas** (*Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biayaringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. **Keterbukaan** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
6. **Ketidakberpihakan** (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
7. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum** (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. Rencana Strategis

Dalam rangka menunjang terealisainya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Raha telah menentukan rencana strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
6. Peningkatan pelayanan Peradilan
7. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Raha

Jumlah keadaan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Raha tahun 2023 dapat dilihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Raha. Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, semua proses perkara dilaksanakan sesuai SOP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Adapun keadaan perkara di Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut :

- Keadaan Perkara tingkat Pertama
 - a) Perkara Pidana
 - Pidana Biasa :

Sisa Perkara Tahun 2022	: --	Perkara
Perkara Masuk	: 174	Perkara
Perkara Putus	: 167	Perkara
Sisa Perkara	: 7	Perkara
 - Pidana Anak
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : --
 - b. Perkara Masuk : 21 Perkara
 - c. Perkara Putus : 21 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --
 - Pidana Cepat
 - a. Sisa perkara Tahun 2022 : --
 - b. Perkara Masuk : 3 Perkara
 - c. Perkara Putus : 3 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --
 - Praperadilan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : --
 - b. Perkara Masuk : 3 Perkara

- c. Perkara Putus : 3 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --
- Lalu Lintas
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : --
 - b. Perkara Masuk : 1247 Perkara
 - b. Perkara Putus : 1247 Perkara
 - c. Sisa Perkara : --
- b) Perkara Perdata
 - Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : 2 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 17 Perkara
 - c. Perkara Putus : 14 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 5 Perkara
 - Gugatan Sederhana
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : --
 - b. Perkara Masuk : 1 Perkara
 - c. Perkara Putus : 1 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --
 - Permohonan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : --
 - b. Perkara Masuk : 43 Perkara
 - c. Perkara Putus : 43 Perkara
 - d. Sisa Perkara : --
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
 - a) Perkara Pidana Biasa
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : 8 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 49 Perkara
 - c. Perkara Putus : 42 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 7 Perkara
 - b) Perkara Pidana Anak
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : --
 - b. Perkara Masuk : 7 Perkara
 - c. Perkara Putus : 6 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 1 perkara
 - c) Perkara Perdata

- Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : 2 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 5 Perkara
 - c. Perkara Putus : 6 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 1 Perkara
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
 - a) Perkara Pidana
 - Perkara Pidana Biasa
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : 14 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 29 Perkara
 - c. Perkara Putus : 29 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 14 Perkara
 - Perkara Pidana Anak
 - a. Sisa perkara tahun 2022 : 2 perkara
 - b. Perkara Masuk : 2 Perkara
 - c. Perkara putus : 3 perkara
 - d. Sisa Perkara : 1 Perkara
 - b) Perkara Perdata
 - Gugatan
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : 2 Perkara
 - b. Perkara Masuk : 4 Perkara
 - c. Perkara Putus : 1 Perkara
 - d. Sisa Perkara : 5 Perkara
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
 - a) Perkara Pidana
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 : --
 - b. Perkara Masuk : 1 perkara
 - c. Perkara Putus : 1 Perkara
 - d. Sisa Perkara : -
 - b) Perkara Perdata
 - a. Sisa Perkara Tahun 2022 :--
 - b. Perkara Masuk : --
 - c. Perkara Putus : --
 - d. Sisa Perkara : --

Keadaan Perkara pidana dan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Raha Tahun 2023

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Pidana Biasa	-	174	167	7	
2.	Pidana Khusus Anak	-	21	21	-	
4.	Pidana Cepat	-	3	3	-	
5.	Pidana Praperadilan	-	3	3	-	
6.	Perkara Lalu-Lintas	-	1247	1247	-	
7.	Gugatan	2	17	14	5	
8.	Permohonan	-	43	43	-	
9.	Gugatan Sederhana	-	1	1	-	

B. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Raha pada Tahun 2023 berusaha agar menyelesaikan semua perkara yang masuk. Namun sampai dengan akhir tahun 2023 ternyata terdapat beberapa perkara yang masih dalam proses berperkara. Kurangnya hakim, dan meningkatnya jumlah perkara pada tahun 2023 menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam menyelesaikan sebuah perkara.

- Jumlah sisa perkara yang di putus

a) Perkara Pidana

a. Pidana Biasa

Jumlah perkara Pidana Biasa pada tahun 2023 yang masuk pada Pengadilan Negeri Raha adalah 174 (seratus tujuh puluh empat) perkara. Hingga akhir bulan Desember 2023 perkara yang dapat diselesaikan hanya 167 (seratus enam puluh tujuh) perkara. Perkara yang masih belum dapat diselesaikan sebanyak 7 (tujuh) perkara.

b. Pidana anak

Pada tahun 2023 jumlah perkara pidana anak yang masuk adalah 21 (dua puluh satu) perkara. Semua perkara anak tersebut dapat di selesaikan, sehingga tidak ada sisa perkara anak yang belum diselesaikan pada Pengadilan Negeri Raha.

c. Pidana Cepat

Pada tahun 2023 jumlah perkara pidana cepat yang masuk adalah 3 (tiga) Perkara dan semuanya dapat diselesaikan. Sehingga pada akhir tahun 2023 tidak ada sisa perkara pidana cepat pada Pengadilan Negeri Raha.

d. Praperadilan

Pada tahun 2023 jumlah perkara praperadilan yang masuk sebanyak 3 (tiga) perkara. Semua perkara tersebut dapat diselesaikan sehingga pada

akhir tahun 2023 tidak ada sisa perkara praperadilan pada Pengadilan Negeri Raha.

e. Lalu Lintas

Pada tahun 2023, jumlah perkara lalu lintas yang masuk adalah sebanyak 1247 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) perkara. Semua perkara tersebut dapat diselesaikan sehingga pada akhir tahun 2023 tidak ada sisa perkara pidana lalu lintas pada Pengadilan Negeri Raha.

b) Perkara Perdata

a. Gugatan

Jumlah gugatan pada tahun 2023 ditambah tahun sebelumnya di Pengadilan Negeri Raha adalah 19 (Sembilan belas) Perkara. Sampai dengan akhir Desember 2023, sisa gugatan yang belum putus adalah 5 (lima) Perkara.

b. Gugatan Sederhana

Pada tahun 2023, perkara gugatan sederhana yang masuk ada sebanyak 1 (satu) perkara. Perkara tersebut dapat diselesaikan sehingga pada akhir tahun 2023 tidak ada sisa perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Raha.

c. Permohonan

Pada tahun 2023, perkara permohonan yang masuk pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara. Semua perkara tersebut dapat diselesaikan sehingga pada akhir tahun 2023 tidak ada sisa perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Raha.

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

a) Perkara Pidana

Dari keseluruhan perkara Pidana yang masuk pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Raha, tidak ditemukannya perkara putus yang mencapai 150 (seratus lima puluh) Hari.

b) Perkara Perdata

Dari Keseluruhan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Raha, tidak ditemukannya perkara putus yang mencapai 150 (seratus lima puluh) Hari.

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi, dan PK

1. Banding

a) Perkara Pidana

Dari 194 (seratus enam puluh tujuh) perkara yang putus di Pengadilan Negeri Raha, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.

b) Perkara Perdata

Dari 58 (lima puluh delapan) Perkara Perdata yang putus di Pengadilan Negeri Raha. Sebanyak 53 (lima puluh tiga) Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

2. Kasasi

a) Perkara Pidana

Dari 48 (empat puluh delapan) Perkara yang diputus pada tingkat banding, terdapat 17 (tujuh belas) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

b) Perkara Perdata

Dari 5 (lima) Perkara yang diputus pada tingkat banding, ada 1 (satu) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

3. PK (Peninjauan Kembali)

a) Perkara Pidana

Pada tahun 2023, dari 32 (tiga puluh dua) perkara yang diputus pada tingkat kasasi terdapat 31 (tiga puluh satu) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

b) Perkara Perdata

Dari semua perkara perdata yang masuk pada tahun 2023, tidak terdapat perkara yang melakukan upaya hukum.

- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi.

Pengadilan Negeri Raha senantiasa melakukan Mediasi kepada para pihak yang berperkara sebelum memasuki tahapan pokok gugatan. Dari 11 (Sebelas) Perkara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raha kepada pihak yang berperkara pada tahun 2023, namun tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasi.

- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi

Adapun perkara anak yang diperiksa di Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2022 berjumlah 20 (dua puluh) Perkara. Sebanyak 18 (delapan belas) perkara yang berhasil diselesaikan melalui Diversi dan 2 (dua) perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui Diversi.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Raha terus berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Hal ini

disebabkan karena pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan menjadi salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Selanjutnya, sertifikat jaminan mutu pelayanan peradilan harus dimiliki oleh setiap pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung juga memandang penting peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan karena hal tersebut akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

Pengadilan Negeri Raha yang merupakan salah satu Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, telah Mendapatkan Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai nilai A (excellent), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021 pada tanggal 10 Maret 2021 di Jakarta . Selain itu, Pengadilan Negeri Raha juga memperoleh predikat sebagai terbaik Harapan II dalam lomba bagi satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2472/DJU/SK/HM.02.3/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 untuk kategori Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.



- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan Negeri adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Raha ditahun 2023 telah memberikan layanan Posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan, dengan menunjuk LBH MUNA. Layanan Posbakum yang di berikan adalah sesuai dengan Sesuai PERMA NO. 1 Tahun 2014 Pasal 25 yang meliputi Pemberian informasi ,konsultasi,atau aktivis hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Penyedian informasi daftar organisasi bantuan hukum. Penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi; Posbakum dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama; dan bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap; itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Layanan Posbakum LBH MUNA telah dilakukan di Pengadilan Negeri Raha selama 12 Bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023.

Daftar pengurus Posbakum LBH MUNA Pada Pengadilan Negeri Raha

No	Nama Posbakum	Anggota	Alamat	Keterangan
1	LBH MUNA	1. YOHANES SIMON LEDA, S.H.	RAHA	KETUA
		2. MUH. WIZRUN, SE	RAHA	DEWAN PENGAWAS
		3. SITI ZARFIA, S.Pd	RAHA	SEKRETARIS
		4. MUH. KASRI	RAHA	BENDAHARA
		5. SITI SATRIANI ASWAT, S.H.,M.H.	RAHA	ADVOKAT
		6. MULIATI, S.H.	RAHA	ADVOKAT
		7. FARLIN, S.H.	RAHA	ADVOKAT
		8. DIRK WILEM JONAS, SH.	RAHA	ADVOKAT
		9. SARIFUDDIN, SH.	RAHA	ADVOKAT
		10. ABDUL RAZAK ALI SAID, SH.	RAHA	ADVOKAT
		11. LA FAHAMU	RAHA	PARALEGAL
		12. SUPRIANTO, S.Sos.	RAHA	PARALEGAL
		13. SRI SUSANTI, SP	RAHA	PARALEGAL

Selama masa setahun layanan Posbakum LBH MUNA di Pengadilan Negeri Raha telah menghasilkan volume layanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Posbakum pada Pengadilan Negeri Raha

No	Nama Posbakum	Jumlah Layanan	Keterangan
1	LBH MUNA	50 Perkara Pidana	3 perkara masih berjalan

Anggaran Layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Raha berdasarkan anggaran pada DIPA 099671 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Raha	31.200.000	31.200.000	100

- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling pada Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapatnya anggaran pada kegiatan Sidang Keliling

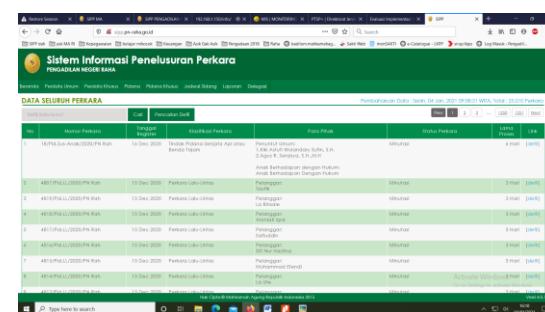
- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Perkara Prodeo atau pembebasan biaya perkara untuk masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, setiap tahun tidak pernah ada yang mengajukan perkara prodeo ke Pengadilan Negeri Raha sehingga tidak dapat dilaksanakan atau tidak pernah terpakai anggaran yang sudah di anggarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun anggaran 2023 anggaran perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Raha memang tidak disediakan .

Sepanjang Tahun 2023 Pengadilan Negeri Raha, telah mengaplikasikan Standar Operasional Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara secara tertib, sehingga semua proses perkara dilaksanakan sesuai SOP baik administrasi manual maupun pada aplikasi SIPP. Transparansi Informasi Proses perkara juga dapat dipublikasikan dengan baik melalui aplikasi SIPP web yang beralamat di <http://sipp.pn-raha.go.id>, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung informasi dengan mudah baik langsung akses ke alamat tersebut ataupun mengunjungi website resmi Pengadilan Negeri Raha.



WEBSITE PN-RAHA



SIPP WEB PN-RAHA

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

Jumlah SDM pada Pengadilan Negeri Raha adalah 38 Orang, terdiri atas 29 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 9 Orang pegawai Honorer. Komposisi SDM pada Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Pangkat / Golongan / Pendidikan, dapat dilihat pada daftar di bawah ini:

No	NAMA UNIT	GOL.	JENIS KELAMIN		JUMLAH	JENIS PENDIDIKAN												KET
						S.2		S.1		D.3		SMA		SMP		SD.		
			L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	PENGADILAN NEGERI RAHA	IV/b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah Pegawai PN Raha 29 orang / 31 Desember 2023
			IV/a															
			III/d	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
			III/c	5	5	10	-	1	3	3	-	-	2	1	-	-	-	
			III/b	6	1	7	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
			III/a	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
			II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			II/c	3	1	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
			II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah	22	7	29	7	1	10	4	1	1	4	1	-	-	-	-

- Mutasi

Pada Tahun 2023 terdapat 1 (satu) orang pegawai yang di mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Raha. Table mutasi sebagai berikut:

MUTASI MASUK :

No	Unit kerja Asal	Nama Pegawai	Unit kerja	Keterangan Tujuan
1	PN Gorontalo	Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.	PN Raha	Wakil Ketua

MUTASI KELUAR

No	Unit kerja Asal	Nama Pegawai	Unit kerja	Keterangan
			Tujuan	
1	--			

- **Promosi**

1. Promosi Jabatan Struktural

Pada tahun 2023 terdapat promosi jabatan struktural yaitu Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata. Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi antar jabatan, yakni Panitera Muda Perdata mendapat promosi sebagai Panitera Muda Pidana dan sebaliknya Panitera Muda Pidana menjadi Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Raha. Selain itu, terdapat promosi jabatan Wakil Ketua karena sebelumnya jabatan tersebut masih kosong.

2. Promosi Jabatan Teknis

Pada Tahun 2023 tidak terdapat terdapat Promosi Jabatan Teknis.

- **Pensiun**

Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang pensiun, sehingga pada Pengadilan Negeri Raha terdapat pengurangan jumlah Pegawai.

- **Diklat (SDM Teknis / Non Teknis)**

Pada Tahun 2023 terdapat 4 orang pegawai yang di mengikuti Diklat Teknis, dan tidak ada pegawai yang mengikuti diklat nonteknis. Tabel diklat adalah sebagai berikut :

DIKLAT TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT
1.	Muhammad Sukamto, S.H.,M.H.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan singkat eksekusi putusan perdata bagi Hakim dan Panitera peradilan umum
2	Abdul Hafid, S.H.	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Panitera Pengadilan Angkatan I - Pelatihan singkat eksekusi putusan perdata bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum
3	Muhammad Akbar Rusli, S.H.,M.H.	Hakim	Diklat Hakim Berkelanjutan I
4	Suwasta, S.H.	Panitera Muda Perdata	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan singkat eksekusi putusan perdata bagi Hakim dan Panitera peradilan umum

			<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Teknis Yudisial PP Peradilan Umum seluruh Indonesia
5	Syamsu Alam	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Teknis Manajemen ASN

DIKLAT NON TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DIKLAT
1	--		
2			

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Belanja Pegawai

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023, pagu belanja pegawai sebesar Rp. 3.181.388.000,- (Tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

b. Realisasi

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.126.684.415,- (tiga milyar seratus dua puluh enam ratus enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah).

c. Sisa

Sisa belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 68.828.598,- (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah)

2. Belanja Barang

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023, pagu belanja barang sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 1.601.475.000,- (satu milyar enam ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 197.200.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

b. Realisasi

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 1.587.349.987,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 196.921.200,- (seratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).

c. Sisa

Sisa belanja barang tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- DIPA 01 (099670) sebesar Rp. 14.125.013,- (empat belas juta seratus dua puluh lima ribu tiga belas rupiah).

- DIPA 03 (099671) sebesar Rp. 278.800,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

3. Belanja Modal

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023, pagu belanja Modal sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

b. Realisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023, pagu belanja Modal sebesar Rp. 146.355.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

c. Sisa

Sisa Belanja Modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Dengan demikian, dari hasil realisasi di atas maka persentase penyerapan anggaran yang dicapai adalah **98,60%** untuk DIPA 01 dan **99,86%** untuk DIPA 03.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kualitas Sumber Daya Manusia dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta layak merupakan faktor pendukung kinerja Pengadilan Negeri Raha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan efektif dan lebih baik.



Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Raha berdiri di atas tanah seluas 4.159 m² yang penyelesaian pembangunannya dilaksanakan tahun 2016 juga telah dibarengi dengan pengadaan kelengkapan fasilitas perkantoran yang walaupun masih jauh dari kata sempurna namun sangatlah mendukung pelaksanaan kinerja dalam menuntaskan tugas-tugas pokok sehari hari.

Adapun sarana dan prasarana gedung yang ada pada Pengadilan Negeri Raha termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6 bh	Tanah Rumah Dinas
2	Tanah bangunan gedung kantor	1 bh	Gedung kantor
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 unit	Gedung Kantor
3	Rumah Negara Golongan II Type B permanen	1 unit	Rumah Dinas
4	Rumah Negara Golongan Ii Tipe C Permanen	10 Unit	Rumah Dinas

Rumah Dinas :

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-		
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-		
3.	Rumah Dinas Hakim	9	9	-	-	2 unit ditempati Panitera dan sekretaris

Kendaraan Dinas :

NO	URAIAN	Tahun Perolehan	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4	1				
1.	Minibus Toyota Kijang Innova	2007		1		
2.	Minibus Daihatsu Xenia	2014	1			
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Jupiter MX			2		
2.	Mega Pro				1	

Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Negeri Raha :

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
6.	Ruang Sekretaris	1	
7.	Ruang Panitera Pengganti dan Juru Sita	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	1	
9.	Ruang Kesekretariatan	1	
10.	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
11.	Ruang Bapas	1	
12.	Ruang Sidang	2	
13.	Ruang Sidang Anak	1	

14.	Ruang Jaksa	1	
15.	Ruang Tahanan	2	
16.	Ruang Petugas Polisi	1	
17.	Ruang Ramah Anak	1	
18.	Ruang Mediasi/Kaukus/Diversi	1	
19.	Ruang Teleconference	1	
20.	Ruang Tamu Terbuka	1	
21.	Ruang Posbakum	1	
22.	Ruang Arsip	2	
23.	Ruang Perpustakaan	1	
24.	Ruang Rapat	1	
25.	Ruang Laktasi	1	
26.	Ruang Barang Bukti	1	
27.	Ruang Ramah Anak Korban/Saksi	1	
28.	Ruang Koperasi	1	
29.	Ruang Dharmayukti	1	
30.	Ruang Serbaguna	1	
31.	Ruang Olahraga	1	
32.	Ruang Kantin	1	
33.	Ruang Gudang	2	

Sarana dan Prasarana Fasilitas di Pengadilan Negeri :

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
	Tanah		
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4,370 M ²	
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4,159 M ²	
	Peralatan Dan Mesin		
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2 Unit	
4.	Sepeda Motor	3 Unit	
5.	Lemari Kayu	38 Buah	
6.	Rak Besi	11 Buah	
7.	Rak Kayu	5 Buah	
8.	Filing Cabinet Besi	3 Buah	
9.	Filing Cabinet Kayu	1 Buah	
10.	Brandkas	2 Buah	
11.	Locker	1 Buah	
12.	CCTV-Camera Control Television System	2 Buah	
13.	Papan Visual/ Papan Nama	21 Buah	
14.	Alat Detector Barang Terlarang/ X-Ray	1 Buah	
15.	Peta	1 Buah	
16.	LCD Projector/Infocus	1 Buah	
17.	Perkakas Kantor Lainnya	3 Buah	
18.	Meja Kerja Kayu	63 Buah	
19.	Kursi besi / metal	108 Buah	
20.	Kursi kayu	8 Buah	
21.	Sice	10 Buah	
22.	Bangku panjang kayu	10 Buah	

23.	Meja Rapat	4 Buah	
24.	Tempat tidur kayu	3 Buah	
25.	Meja telepon	1 Buah	
26.	Meja resepsionis	2 Buah	
27.	Kasur/ spring bed	2 Buah	
28.	Sketsel	- Buah	
29.	Meja makan kayu	2 Buah	
30.	Jam elektronik	2 Buah	
31.	Mesin pemotong rumput	1 Buah	
32.	Lemari es	1 Buah	
33.	A.C. window	1 Buah	
34.	A.C split	26 Buah	
35.	Kipas Angin	- Buah	
36.	Televisi	2 Buah	
37.	Sound system	1 Buah	
38.	Lambang garuda pancasila	2 Buah	
39.	Gambar presiden / wakil presiden	2 Buah	
40.	Tiang bendera	4 Buah	
41.	Pataka	- Buah	
42.	Kaca Hias	4 Buah	
43.	Mimbar/Podium	1 Buah	
44.	Palu sidang	- Buah	
45.	Gordyin / Kray	107 Buah	
46.	Uninterruptible Power Supply(UPS)	5 Buah	
47.	Finger Printer Time and Attandance Access Control System	1 Buah	
48.	Asbak tinggi	- Buah	
49.	Facsimile	- Buah	
50.	Local battery telephone	- Buah	
51.	CT scanner	1 Buah	
52.	Therme P.A.C	1 Buah	
53.	TV Monitor	3 Buah	
54.	Stabilizer/UPS	2 Buah	
55.	Kamera Digital	1 Buah	
56.	GPS	1 Buah	
57.	Komputer Jaringan Lainnya	1 Buah	
58.	P.C. unit	28 Buah	
59.	Laptop	35 Buah	
60.	CPU (Peralatan Mainframe)	- Buah	
61.	Papan pengumuman	1 Buah	
62.	Sofa	1 buah	
63.	Portable air conditioner (alat pendingin)	4 buah	
64.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16 Buah	
65.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 Buah	
66.	Peralatan Jaringan Lainnya	1 Buah	
67.	Peralatan Bantu Lainnya	2 unit	
68.	Server	2 buah	
69.	Router	1 buah	
70.	Rak Server	1 buah	
71.	Genset	1 Buah	
72.	Loudspeaker	4 buah	
73.	Microphone	7 buah	
74.	Mic Conference	1 buah	

75	Dispenser	1 buah	
76	Bracket Standing peralatan	1 buah	
77	Audio mixing console	1 buah	
78	Diaso Printer, 404	2 buah	
79	LCD Monitor	1 buah	
80	Camera Conference	1 buah	
81	Kursi Zeis	24 Buah	
82	Komputer Wedis	3 buah	
83	Air Conditioning	2 buah	
84	Alat bantu lainnya	1 buah	
85	Meja Kerja Besi/Metal	2 buah	
86	Tongkat panjang	2 buah	
87	Note Book	1 buah	
Gedung Dan Bangunan			
90	Bangunan gedung kantor permanen	3 unit	
91	Gedung garasi/ pool permanen	1 unit	
92	Rumah Negara golongan II Tipe C Permanen	11 unit	
Irigasi			
93	Sumur dengan pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1 unit	
94	Bak penyimpanan/ Tower air baku	1 unit	
Jaringan			
95	Instalasi air bersih/ air baku lainnya	1 unit	
96	Instalasi komunikasi elektronik (KOMLEK)	1 unit	
97	Jaringan sambungan ke rumah lainnya	1 unit	
Aset Tetap Lainnya			
98	Monografi	11 buah	
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan			
99	Lemari Kayu	2 buah	
100	Alat detector barang terlarang / X Ray	1 unit	
101	Meja kerja kayu	18 buah	
102	Kursi besi / metal	30 buah	
103	Kursi Kayu	22 buah	
104	Bangku panjang kayu	1 buah	
105	Meja computer	0 buah	
106	Lambang instansi	1 buah	
107	P.C Unit	1 unit	
108	Laptop	1 unit	

a. Pengadaan / Pembangunan

Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Raha mendapat alokasi Belanja Modal berupa :

1. Pengadaan sarana pendukung disabilitas berupa jalur/ toilet untuk disabilitas dan alat bantu dengar sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).
2. Pengadaan Fasilitas perkantoran berupa meja dan kursi ruang tunggu, meja dan kursi ruang tamu terbuka, dan kursi untuk petugas layanan PTSP sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa kursi biro, layar monitor PTSP, AC Split, AC duduk PTSP, dan kursi tamu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

b. Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan kantor terdiri dari :

1. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan termasuk halaman Kantor sebesar Rp 474.521.000,- empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah),
2. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya berupa pemeliharaan Rumah Dinas sebanyak 11 unit dengan biaya sebesar Rp. 105.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu).
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari :
 - Perawatan Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 Unit dengan jumlah biaya sebesar RP. 66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah)
 - Perawatan Kendaraan Roda Dua sebanyak 3 unit sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah.)
 - Personal Komputer sebanyak 12 unit dengan jumlah biaya perawatan sebesar Rp.12.410.000,-(dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Laptop sebanyak 15 unit dengan nilai perawatan sebesar Rp.12.410.000,- (dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - AC sebanyak 17 Unit nilai perawatan sebesar Rp.9.150.000,-(Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Printer sebanyak 10 unit dengan nilai perawatan sebesar Rp. 10.350.000.- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Perawatan Genset selama 1 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Bahan Bakar Genset selama 1 tahun sebesar Rp. 7000.000,- (tujuh Juta Rupiah)
 - Pemeliharaan IT selama 1 tahun sebesar Rp. 34.024.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah)
 - Pemeliharaan sound system 1 unit sebesar Rp. 2.564.000,- (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)

c. Penghapusan

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Raha tidak ada usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) karena telah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2021.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan penunjang untuk mendukung operasional kinerja di Pengadilan baik untuk penyelesaian administrasi proses perkara dan pelayanan informasi

perkara. Pada Pengadilan Negeri Raha saat ini, dukungan fasilitas komputer unit untuk memperlancar kinerja sudah terpenuhi, olehnya itu ditahun 2023 ini sesuai dengan PERMA NO.4 Tahun 2020 sebagai pembaharuan dari PERMA NO.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Electronik Pengadilan Negeri Raha telah melaksanakan dan serta telah mensosialisasikan kesemua lembaga bantuan hukum yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raha maupun kepada Masyarakat serta instansi otonom di tiga kabupaten yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, Administrasi Perkara dan Persidangan secara Electronik (Ecourt) tentunya tidak terlepas dari proses yang ada pada SIPP sedangkan untuk pelayanan informasi berupa aplikasi CTS (Case Tracking System) telah berjalan dengan baik ditambah dengan adanya pengadaan perangkat pendukung SIPP di tahun 2023 ini.

Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Raha secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perangkat Lunak atau Aplikasi Pendukung

a. E-Court (ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)

Pada tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian pada tanggal 13 Juli 2018, Ketua MA Prof. Dr. H. M Hatta Ali, S.H., M.H. melaunching aplikasi e-court di Balikpapan.

Aplikasi E-court atau administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan dapat diakses dengan alamat ecourt.mahkamahagung.go.id dengan akses alamat ini para Pengacara Advokat serta perseorangan dapat membuat sendiri alamat Email guna dapat terdaftar sebagai pengguna dalam prosesi pendaftaran perkara serta persidangan secara elektronik. e-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Court Mahkamah Agung RI dapat diakses melalui tautan <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Aplikasi e-Court telah di Implementasikan pada Pengadilan Negeri Raha di akhir tahun 2019, dan sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 61 Perkara yang terdaftar melalui aplikasi e-Court.



b Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS)

SIPP merupakan Aplikasi berbasis Web yang menyediakan Informasi perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan minutasi, dengan akses langsung melalui alamat <http://sipp.pn-raha.go.id/> atau mengunjungi website resmi Pengadilan Negeri Raha. Aplikasi SIPP di Pengadilan Negeri Raha saat ini menggunakan versi 5.3.1 yang terkoneksi dan di pantau oleh Mahkamah Agung. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI RAHA								
53								
Selamat Datang, Anda Login Sebagai User Administrator Logout								
Edit Profile								
DAFTAR PERKARA PIDANA BIASA								
Total 2.564								
Klik Kotak Kunci								
Search								
Search Detil								
Cetak								
Tambah Perkara								
No	Nomor Perkara	Tanggal Registrasi	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	1/Pid.8/2024/PN Raha (e-kepadu)	04 Jan, 2024	Pengadilan	Penuntut Umum: 1.Agus R. Sanjaya, S.H.,M.H 2.LM MARDANI, R.,S.H Terdakwa: IVA COCOK BINTI LA HUSEAINI	Penelitian	Sidang pertama	4 Hari	[detil]
2	174/Pid.Sus/2023/PN Raha (e-kepadu)	01 Des, 2023	Pengadilan	Penuntut Umum: 1.LM MARDANI, R.,S.H 2.Aagus R. Sanjaya, S.H.,M.H Terdakwa: MIRAHMAD DENI AK AFTA DBH BIN AMRIUDIN	Putusan	Minutasi	21 Hari	[detil]
3	173/Pid.Sus/2023/PN Raha (e-kepadu)	30 Nov, 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: 1.YULIANTINGSH, I.H. 2.MOCHAMAD DJONHADI, I.H., MH Terdakwa: IRWAN ALIUS IWA BIN LA EDI	Banding	Pengiriman Berkas Banding	15 Hari	[detil]
4	172/Pid.Sus/2023/PN Raha (e-kepadu)	30 Nov, 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: 1.LM MARDANI, R.,S.H 2.Aagus R. Sanjaya, S.H.,M.H Terdakwa: LA ODE BAHARUDIN BIN LAODE HANIFA	Putusan	Minutasi	15 Hari	[detil]
5	171/Pid.Sus/2023/PN Raha (e-kepadu)	30 Nov, 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: 1.IJRWANTO BAQUS SETYADI, S.H. 2.YULIANTINGSH, I.H. Terdakwa: LA ODE MUZUHRI Alias OPA BIN LA ITO	Peridangan	Peridangan	41 Hari	[detil]
6	170/Pid.Sus/2023/PN Raha (e-kepadu)	30 Nov, 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: 1.IJRWANTO BAQUS SETYADI, S.H. 2.YULIANTINGSH, I.H. Terdakwa: LAPINI BIN HAATMU	Peridangan	Peridangan	41 Hari	[detil]
7	169/Pid.Sus/2023/PN Raha (e-kepadu)	30 Nov, 2023	Perlindungan Anak	Penuntut Umum: 1.IJRWANTO BAQUS SETYADI, S.H. 2.YULIANTINGSH, I.H.	Peridangan	Peridangan	41 Hari	[detil]

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

- **Akreditasi Penjamin Mutu**

Pengadilan Negeri Raha terus berbenah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Hal ini disebabkan karena pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan menjadi salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Selanjutnya, sertifikat jaminan mutu pelayanan peradilan harus dimiliki oleh setiap pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Makamah Agung juga memandang penting peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan karena hal tersebut akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

Pengadilan Negeri Raha yang merupakan salah satu Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, telah Mendapatkan Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai nilai A (excellent), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021 pada tanggal 10 Maret 2021 di Jakarta . Selain itu, Pengadilan Negeri Raha juga memperoleh predikat sebagai terbaik Harapan II dalam lomba bagi satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 2472/DJU/SK/HM.02.3/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 untuk kategori Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengambilan melalui satu pintu.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Raha terdiri dari Layanan Pokok meliputi : Penatausahaan surat dan Buku tamu, Meja Informasi, Meja Pengaduan, Meja I, Meja II, Meja III dan Petugas Pembayaran (Kasir) yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP. Untuk penatausahaan Surat masuk dan keluar pada Pengadilan Negeri Raha di tahun 2023 tercatat 1062 Surat Masuk, 2712 Surat Keluar, dan 697 Tamu.

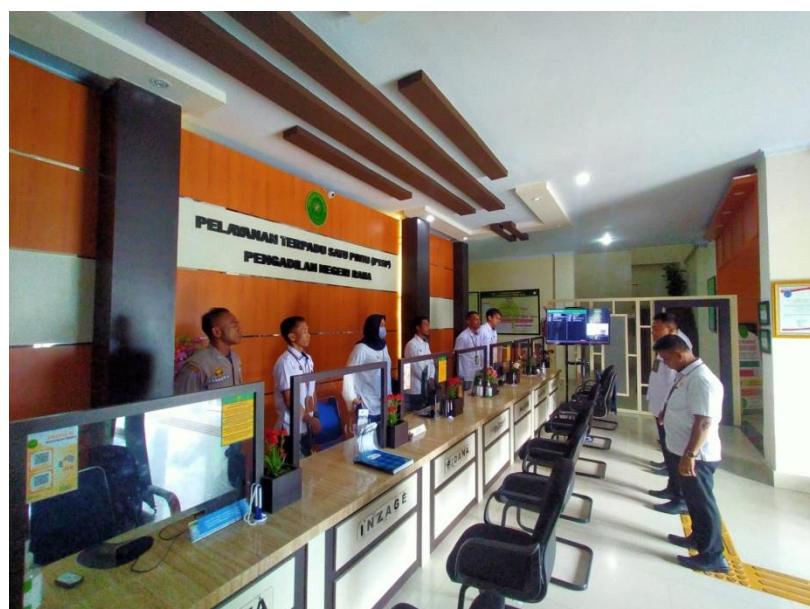
Pada Pengadilan Negeri Raha telah di Tunjuk Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Raha W23-U3/281/OT.01.3/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Raha.

Adapun pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut :

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Sukamto, S.H., M.H. NIP. 197820826 200112 1 001	Hakim Madya Pratama / Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	Abdul Hafid, SH. NIP. 19710510 199303 1 001	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	M. Nasir NIP. 19650304 198603 1 003	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	Ajidin La Baili, S.H NIP. 19910806 201403 1 001	Panmud Hukum	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
5.	Agus Merdekawati, S.H NIP. 19830817 200704 2 001	Panmud Pidana	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
6.	Suwasta, S.H NIP. 19760810 201101 1 007	Panmud Perdata	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
7.	La Ode Sunia. S.Pd.I NIP. 19731231 199403 1 006	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
8.	Mukmin, S.Kom. NIP. 19800301 201101 1 007	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Penanggung Jawab Pelayanan PTSP
9.	Rahma Aryani Poetri, A.Md. NIP. 19950516 202203 2 019	Pengelola Perkara	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana
10.	Rizky Hendra Budi Prakoso NIP. 19951217 202012 1 006	Pelaksana Arsiparis	Petugas Pelayanan PTSP Umum dan Keuangan

11.	La Ode Abdul Julhia NIP. 19800727 201505 1 001	Pengadministrasi Hukum Perdata	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Perdata
12.	Ivan Prana Putra, S.H. NIP. 19960512 202203 1 004	Analis Perkara Peradilan	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Perdata
13.	La Ode Amana NIP. 19810715 201408 1 001	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Petugas Pelayanan PTSP Kepaniteraan Hukum

Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan bagi para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Raha rutin melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola PTSP, Hakim Pengawas PTSP, Pejabat pengelola PTSP, serta penanggung jawab pelayanan PTSP, kepada seluruh petugas Pelayanan PTSP setiap bulan sekali.



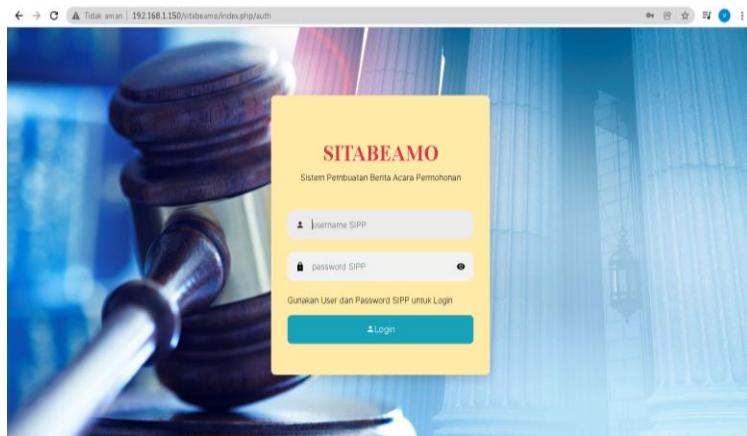
- **Inovasi Pelayanan Publik**

Ada beberapa inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Raha dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik:

1. SITABEAMO

Sitabeamo dalam Bahasa Muna artinya adalah permisi. Latar belakang diberlakukannya inovasi ini, karena belum adanya template berita acara perkara perdata permohonan perubahan nama yang disediakan dalam aplikasi SIPP. Kemudian beban kerja panitera pengganti yang semakin meningkat, karena peningkatan jumlah perkara, maupun karena adanya tugas-tugas tambahan yang dibebankan kepada panitera pengganti. Aplikasi SITABEAMO terintegrasi dengan SIPP, oleh karena itu manfaat dari aplikasi ini dapat membantu panitera pengganti dalam membuat berita acara sidang perkara perdata permohonan perubahan nama, sehingga proses minutasi perkara permohonan bisa lebih cepat. Dampak dari pemakaian aplikasi SITABEAMO adalah dapat terlaksananya

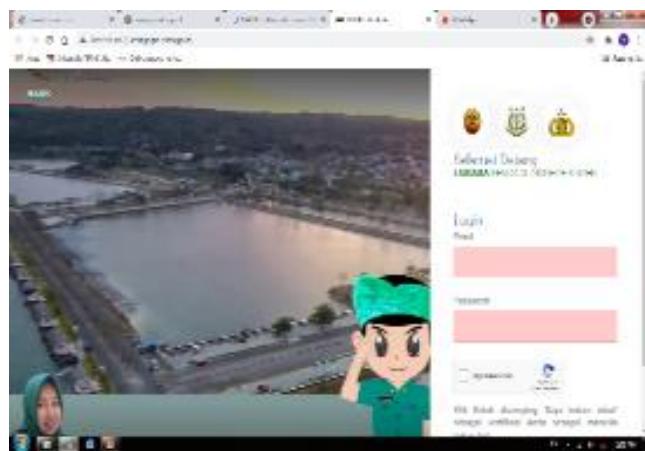
kecepatan dalam pelayanan kepada pemohon dan terlaksananya *one day publish* dan *one day minutation*, serta tidak terjadi lagi kesalahan akibat copy paste, karena data pemohon langsung mengambil data dari SIPP.



2. LA SIAGA-E (LAYANAN PENYITAAN, PENGGELEDAHAN DAN PENAHANAN secara ELEKTRONIK)

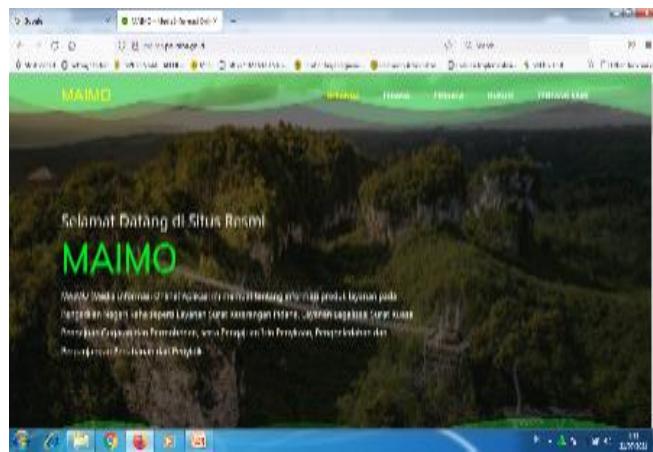
Inovasi LA SIAGA-E merupakan aplikasi untuk layanan permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan dan permintaan perpanjangan penahanan. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi Penyidik pada Polres Muna, Polres Buton Utara dan Kejaksaan Negeri Muna dalam hal permintaan persetujuan/ijin penyitaan, penggeledahan dan perpanjangan penahanan. Hal yang melatar belakangi digagasnya inovasi LA SIAGA-E adalah kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, sehingga Penyidik sering terlambat mengajukan permintaan sita, geledah & penahanan. Kemudian keinginan Pengadilan Negeri Raha untuk mendukung percepatan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara dengan mempersiapkan teknologi informasi yang mumpuni, serta sebagai usaha untuk meminimalisir kontak erat antara Petugas PTSP dengan Pengguna Layanan dimasa Pandemi Covid-19. Dampak langsung dengan adanya inovasi LA SIAGA-E yaitu memberikan kemudahan bagi Penyidik karena dapat mengajukan permintaan persetujuan/ijin penyitaan, penggeledahan dan penahanan dari satker masing-masing, pelayanan izin sita, geledah dan penahanan dapat terlaksana lebih cepat, dan penularan Covid-19 menjadi rendah.

Inovasi ini juga melatarbelakangi pembuatan aplikasi E-PANDU yang saat ini telah diberlakukan pada setiap Pengadilan Negeri yang berada pada Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.



3. MAIMO (MEDIA INFORMASI ONLINE)

MAIMO merupakan media informasi pada Pengadilan Negeri Raha yang berbasis online. MAIMO memuat informasi-informasi terkait produk layanan pada Pengadilan Negeri Raha, misalkan informasi tentang layanan surat keterangan pidana, persyaratan mengajukan gugatan, informasi persyaratan leges surat kuasa, dan leges akta notaris. Informasi tentang persyaratan permintaan izin penyitaan, dan penahanan serta informasi perkara, juga dapat dilihat pada media ini, karena terhubung dengan SIPP Web Pengadilan Negeri Raha. MAIMO dapat dikunjungi melalui link <http://maimo.pn-raha.go.id>. Hal yang melatarbelakangi digagasnya inovasi ini, dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha merupakan wilayah kepulauan, menyebabkan akses masyarakat yang ingin berurusan dengan Pengadilan Negeri Raha menjadi terhambat, khususnya terkait dengan informasi layanan Pengadilan Negeri Raha. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan pada Pengadilan Negeri Raha tersebut, harus jauh-jauh datang ke Kantor Pengadilan Negeri Raha, lalu bertemu dengan Petugas PTSP di Kantor Pengadilan Raha. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah media yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan Pengadilan Negeri Raha. Dengan adanya media ini, tentu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara, dalam memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan produk layanan Pengadilan Negeri Raha. Dampak langsung bagi pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Raha, dengan adanya inovasi MAIMO, maka masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi layanan, tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Raha. Selanjutnya kualitas pelayanan menjadi meningkat, dan juga bisa mengurangi kontak erat antara Petugas PTSP dan pengguna layanan, terlebih dimasa pandemi Covid-19.



4. E-BROSUR

E-BROSUR adalah brosur elektronik Pengadilan Negeri Raha yang berisi tentang informasi-informasi pelayanan peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Raha. Kegunaan aplikasi E-BROSUR berfungsi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat pencari keadilan melalui website maupun media sosial. E-BROSUR adalah sebagai penyempurna dari MAIMO, dan saling melengkapi. Dalam aplikasi E-BROSUR para pengguna layanan Pengadilan Negeri Raha dapat mengunduh brosur-brosur pada medsos-medsos dan website Pengadilan Negeri Raha. Hal yang melatarbelakangi digagasnya inovasi E-BROSUR, yakni penyebaran brosur informasi pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Raha masih dilakukan secara manual di masa pandemi Covid-19. Bahwa dampak langsung dengan adanya inovasi E-BROSUR, masyarakat pencari keadilan tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Raha untuk mencari informasi tentang layanan peradilan. Masyarakat cukup membuka website untuk mengakses E-BROSUR atau menscan QR Code Layanan Peradilan yang ada di media sosial Pengadilan Negeri Raha.



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam rangka mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya, untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Perma tersebut sekaligus mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

Dalam Perma tersebut disebutkan bahwa Setiap atasan langsung berkewajiban antara lain:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dilaksanakan paling sedikit sebulan sekali dengan :

- a. memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meminta laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
- d. merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah - langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.

Pembinaan dilaksanakan dengan:

- a. menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- b. menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;

- c. menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang di nilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- d. membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Negeri Raha, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Raha telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : W23-U3/11/OT.01.3/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

No	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang
1	Melby Nurrahman, S.H.	Hakim	Pidana
2	Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.	Hakim	Perdata
3	Ari Conardo, S.H.	Hakim	Hukum
4	Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.	Hakim	Kepegawaian, dan Ortala
5	Dio Dera Darmawan,S.H.	Hakim	Perencanaan, TI dan Pelaporan
6	Yuri Stiadi, S.H.	Hakim	Umum dan Keuangan

2. Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Raha telah mengikuti rapat Pembinaan dan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Ketua, Panitera dan Sekretaris melakukan pengawasan kepada para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Raha, pengawasan dilakukan secara langsung.

B. Evaluasi

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembentahan dunia peradilan di indonesia merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Sebagai realisasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, maka Pengadilan Negeri Raha telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 kepada seluruh aparat Pengadilan Negeri Raha.
2. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 8 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
3. Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Negeri Raha, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera, Sekretaris dan Jajarannya
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan
5. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Negeri Raha.
6. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
7. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin.
8. Pengawasan yang dilakukan insidentil sesuai kebutuhan dan kondisi di tiap bagian.

Adanya Pengawasan yang dilakukan secara berkala maupun insidentil dan penyelesaian permasalahan yang dilakukan langsung baik melalui rapat pertemuan pemangku jabatan ataupun koordinasi penyelasaian secara bertahap di Pengadilan Negeri Raha, terbukti dapat meminimalisir temuan masing-masing bagian setiap bulannya. Sehingga, di beberapa pertemuan rapat rutin pengawasan ditemukan bagian yang hasil laporan temuan hakim pengawasan nihil, untuk itu pertemuan juga membahas langkah-langkah pereventif untuk mempertahankan kinerja setiap bagian dan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Raha.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, para pegawai perlu diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang menjurus ke bidang administrasi yang telah diadakan oleh Mahkamah Agung RI atau instansi lain.
2. Pembinaan dan Pengawasan telah dilakukan lewat pertemuan rutin bulanan terhadap seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Raha.
3. Kondisi Fasilitas Sarana Lingkungan Kantor yang masih sangat perlu dilakukan pembenahan utamanya pagar keliling kantor sejak tahun didirikannya, tidak pernah diperbarui ataupun direnovasi hingga kurang memberikan kenyamanan dan keamanan kantor Pengadilan Negeri Raha
4. Untuk menunjang persidangan secara virtual pada Pengadilan Negeri Raha kiranya dapat diberikan tambahan peralatan pendukung persidangan sehingga semua ruang sidang dapat menggunakan peralatan persidangan secara online

B. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kerja para tenaga administrasi serta Hakim perlu diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan teknis Yustisial maupun administrasi.
2. Untuk meningkatkan prestasi dan kualitas kerja, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung maupun oleh instansi yang berwenang secara rutin.
3. Renovasi atau Pembangunan Fasilitas Sarana Lingkungan Kantor perlu di realisasikan untuk kemudahan dalam pengajuan anggaran renovasi Fasilitas Sarana Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Raha
4. Pengadaan fasilitas pendukung persidangan secara online sangat perlu untuk segera direalisasikan seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang disidangkan secara virtual

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini banyak kekurangan baik materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya, oleh karenanya kami mengharap saran dan tanggapan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan tugas di masa mendatang makin tertib, baik, benar dan tepat.

Raha, 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

